

Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam

Ryska Nur Ramadhani^{1*}, Muhammad Farid Fadhlurrohman²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *ryskanurramadhani@gmail.com

Kata Kunci:

peran; pemerintah;
ekonomi Islam

Keywords:

the role; government;
Islamic economy

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang peran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, peran pemerintah adalah mengatur dan mengawasi perekonomian, menjamin persaingan pasar yang sempurna, distribusi informasi yang adil, dan keadilan ekonomi. Dan pemerintahan juga merupakan sarana mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui sistem kehidupan yang baik dan terhormat berdasarkan prinsip-prinsip syariat atau hukum Islam. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam urusan perekonomian sangat penting untuk menjamin kelancaran perekonomian negara.

ABSTRACT

This article discusses the role of government in an Islamic economic perspective. In Islam, the role of government is to regulate and supervise the economy, ensuring perfect market competition, fair distribution of information, and economic justice. And government is also a means of creating a prosperous and prosperous society, with the aim of achieving happiness in this world and the hereafter, through a good and honorable life system based on the principles of sharia or Islamic law. Therefore, the government's position in economic affairs is very important to ensure the smooth running of the country's economy.

Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai harapan untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidup, serta mengharapkan peningkatan ke nilai yang lebih tinggi. Untuk memperoleh tujuan tersebut, pastinya dibutuhkan media selain kerja keras individu yang dapat memfasilitasi pemuasan kebutuhan seluruh masyarakat. Media tersebut nantinya yang dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Subjek atau pelaku badan ekonomi mempunyai peranan dalam perekonomian, yakni 1) rumah tangga, 2) perusahaan, 3) negara (pemerintah), dan 4) komunitas luar negeri. Pemerintah mempunyai tugas penting dalam merealisasikan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup. Dalam konteks perekonomian, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, serta mengatur dan mengalokasikan penggunaan sumber daya ekonomi setara dan secara adil.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negaranya. Prinsip keadilan harus diwujudkan oleh negara dalam segala bidang kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Keadilan merupakan pondasi penting dalam perekonomian berbasis Islam yang dapat menciptakan keseimbangan perekonomian dengan mengurangi ketimpangan antar masyarakat.

Kegagalan pasar menjadi alasan mengapa peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian. Mekanisme pasar tidak selalu efisien dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, terutama ketika banyak kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan sumber daya ekonomi dan mengatur serta mengalokasikan penggunaan sumber daya ekonomi setara dan secara adil. Dalam konsep ekonomi Islam, peran pemerintah penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, serta mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan (Soryan, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sudut pandang teoritis dan penulis memfokuskan pada peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian Islam dan implementasinya dalam pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pemerintah

Pemerintah bertindak sebagai pelaksana negara untuk mencapai tujuan bersama, khususnya meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi dan bidang lain. Pembangunan ekonomi melibatkan pengaturan sumber daya dan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya harus memperhitungkan kebutuhan sumber daya untuk membangun ekonomi daerah.

Setiap masyarakat pasti mempunyai harapan untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidupnya. Masyarakat tentunya juga mengharapkan peningkatan ke nilai yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan media lain selain kerja keras perseorangan. Media ini nantinya yang akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Media yang berperan dalam ekonomi, yaitu:

1. Rumah tangga
2. Perusahaan
3. Negara (pemerintah)
4. Komunitas luar negeri.

Negara memegang peranan penting dalam merealisasikan aspirasi masyarakat untuk menaikkan mutu hidup. Dalam konteks ekonomi, negara harus menjamin kesetaraan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dengan mengatur dan mengalokasikan sumber daya tersebut secara adil. Namun, penting untuk dicatat bahwa

konsep liberal menggaris bawahi bahwa kebebasan mutlak dalam kegiatan ekonomi tanpa intervensi pemerintah.

Meskipun kaum sosialis memiliki kekhawatiran tentang kemampuan absolut yang diberikan kepada individu, pemerintah masih menjamin bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur dan mengalokasikan penggunaan sumber daya ekonomi setara dan secara adil.

Dalam ilmu ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diseimbangkan sedemikian rupa sehingga peran individu bebas, namun dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Pemerintah membuat peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendorong keselarasan dengan kegiatan perekonomian. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan perekonomian yang adil dan makmur (Ghafur, 2020).

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah bertanggung jawab mengatur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari perspektif Islam, tanggung jawab pemerintah bersifat fleksibel dan didasarkan pada tujuan Islam yaitu kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut prinsip Islam, negara (pemerintah) berhak melakukan campur tangan terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh perseorangan, baik mengawasi kegiatan tersebut maupun mengatur atau melaksanakan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh perseorangan. Keikutsertaan negara dalam kegiatan ekonomi pada periode awal Islam sangat terbatas karena kegiatan ekonomi masih sederhana. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh pengendalian mental dan stabilitas mental umat Islam awal, yang menjadikan mereka mengikuti perintah hukum Syariah dan sangat berhati-hati untuk melindungi diri dari penyalahgunaan, penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kemampuan negara (pemerintah) untuk melakukan intervensi dalam kegiatan perekonomian.

Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, keadaan, maupun masanya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dianggap sebagai anugerah atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Motor penggerak utama perekonomian syariah adalah kerjasama.
4. Ekonomi Islam menolak penumpukan kekayaan yang dikuasai segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin harta benda masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Umat Islam wajib bertakwa kepada Allah SWT dan hari kiamat di akhirat.
7. Zakat wajib dibayarkan atas harta yang telah mencapai batas (nisab)

8. Riba dilarang dalam Islam dalam bentuk apapun.

Kemudian, ciri-ciri dan tujuan Ekonomi Islam adalah :

1. Aqidah adalah substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan perekonomian.
2. Hukum syariah sebagai batasan dalam perumusan keputusan ekonomi.
3. Akhlak berperan sebagai tolak ukur dalam proses pengoptimalisasian kegiatan perekonomian.

Adapun tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, melalui sistem kehidupan yang baik dan terhormat (Hayatan tayyibah) dengan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah (Mujiatun, 2020).

Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam

Negara memegang peran penting dalam penerapan hukum Islam, karena Islam tidak dapat berfungsi sepenuhnya tanpa negara. Tujuan negara dalam Islam sebenarnya adalah mendatangkan kemaslahatan (maslahah) bagi umat, yang akan mengantarkan umat kepada kesejahteraan. Apabila negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus selaras dengan kehendak Islam.

Dalam landasan ekonomi Islam, pemerintah memegang peran penting dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Prinsip khilafah mengartikan peranan manusia sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan manusia mempunyai akibat tertentu yang harus ditanggungnya. Gagasan mendasar ini memberikan penegasan kepada seluruh umat manusia akan fungsi dan keberadaannya di muka bumi sebagai agen pembangunan.

Agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya, diperlukan media berupa pemerintah. Media pemerintah penting bagi masyarakat agar hubungan antar masyarakat lainnya dapat tetap terjaga dengan baik. Masyarakat dituntut untuk menjaga keharmonisan dalam segala interaksi, dan pemerintah berperan penting dalam menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah berhak melakukan intervensi terhadap bidang perekonomian yang dilakukan oleh perseorangan, baik mengawasi kegiatan badan-badan perekonomian maupun mengatur permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian yang tidak dapat dilakukan oleh perseorangan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menunaikan tugas kolektifnya dengan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban hidup bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif Islam, keberadaan dan peran pemerintah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Peran negara dalam perekonomian syariah dilakukan melalui alat dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam aspek hukum, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Pemerintah berperan sebagai pemilik sebenarnya atas sumber daya perekonomian masyarakat, termasuk produksi dan distribusi, serta merupakan lembaga yang mengawasi kehidupan perekonomian. Namun intervensi pemerintah ini bukan berarti pemerintah memonopoli seluruh sumber daya perekonomian negara. Setiap intervensi pemerintah ditujukan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang bertakwa.

Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan pasar yang efisien dimana harga yang terbentuk sama dengan biaya minimum untuk memproduksi satu unit barang. Pasar efisien terjadi ketika tidak ada individu yang dapat menetapkan harga pasar, sehingga setiap produsen dapat menetapkan harga konstan yang sama dengan harga minimum. Namun untuk mencapai pasar yang efisien diperlukan intervensi pemerintah, karena pencapaiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan pasar.

Peran pemerintah dalam perspektif Islam juga meliputi aspek yang luas seperti menjamin persamaan hak bagi semua individu dan menghilangkan intimidasi, serta melindungi perekonomian agar dapat tumbuh dan berkembang dengan stabil. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menciptakan pasar yang efisien, menjamin keamanan hak-hak semua individu dan menghilangkan penindasan.

Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sangat ditekankan. Pemerintah diharapkan untuk menjaga kesamaan hak setiap individu, menghapuskan penindasan, serta mengatur dan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara adil. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat (Soryan, 2016).

Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam menekankan beberapa aspek penting, seperti menjaga persamaan hak semua individu, menghilangkan penindasan, dan menciptakan manfaat ekonomi berupa kemakmuran dan keadilan derajat ekonomi dalam masyarakat (Munir, 2011). Berikut ini beberapa poin penting mengenai peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam:

1. Kepemimpinan negara : Dalam konsep ekonomi Islam, negara mempunyai otoritas yang paling besar untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, asalkan tugas-tugas tersebut dijalankan secara adil dan demokratis, dimana semua ketetapan diambil setelahnya dengan mempertimbangkan wakil-wakil rakyat.
2. Mencegah kesalahan ekonomi: Dalam kebijakan ekonomi Islam, negara mempunyai misi dan tanggung jawab untuk menjaga keadilan dalam perekonomian, mencegah ketidakadilan, dan menindak para pelanggar hukum di bidang perekonomian.
3. Intervensi pemerintah (stabilisator): Intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam mencakup mendorong hal yang baik dan mencegah hal yang munkar, seperti monopoli dan praktik korup.
4. Kebijakan fiskal dan moneter (regulator): Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi sumber daya.
5. Pasar dan efisiensi (alokasi dan distributor): Dalam ekonomi Islam, pasar mempunyai peranan penting dalam menyajikan produk dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan (Hakim, 2015).

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam melibatkan menjaga kesejahteraan dan keadilan masyarakat, mencegah kesalahan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga dan distribusi sumber daya melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut pandangan ekonomi Islam, negara memainkan peranan yang penting dalam perekonomian dan para ulama serta pakar ekonomi Islam telah membahas masalah ini sepanjang sejarah. Dalam konsep ekonomi Islam, negara mempunyai otoritas yang luas untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, asalkan tugas-tugas tersebut dijalankan adil dan secara demokratis, dan ketetapan diambil setelah berdiskusi dengan wakil-wakil rakyat. Namun, meski Islam memberikan peran penting kepada Negara, konsep ekonomi Islam tidak mengabaikan kebebasan individu (Soryan, 2016).

Kesimpulan dan Saran

Dalam konsep ekonomi Islam, pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian, menjamin persaingan pasar yang baik, distribusi informasi yang adil dan keadilan ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, peran pemerintah ditekankan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus menjamin persamaan hak bagi seluruh individu dan menghilangkan penindasan, serta menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan berkembang secara mantap. Pemerintah juga berperan sebagai perantara dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan sejahtera, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui pola hidup yang baik dan terhormat berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam urusan perekonomian sangat penting untuk menjamin kelancaran perekonomian negara.

Daftar Pustaka

- Ghafur, N. F. (2020). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-18.
- Hakim, M. A. (2015). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishadia*, 19-40.
- Mujiatun, S. (2020). Peran Pemerintah tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Analytica Islamica*, 90-107.
- Munir, M. (2011). Peran Pemerintah dalam Perekonomian dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 1-22.
- Soryan, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 288-314.